



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kantor Kesbangpol serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah).

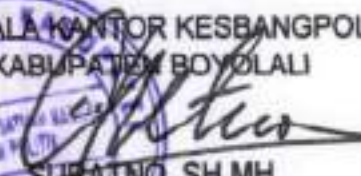
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

LKjIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Bupati Boyolali.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kantor Kesbangpol Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Boyolali, Januari 2020

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI

SURATNO, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19660430 199503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis Organisasi	6
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	8
3.2 Realisasi Anggaran	13
BAB IV PENUTUP	16
4.1 Simpulan	16
4.2 Saran	16

DAFTAR LAMPIRAN..... 18

- A Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016 - 2021
- B Penetapan Kinerja (Tapkin) 2020
- C Pengukuran Kinerja (PK) 2020
- D Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol
- E Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020
- F Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	7
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1	9
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Keuangan Kantor Kesbangpol	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (***result oriented government***). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LKjIP 2020.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, laporan Akuntabilitas Dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kantor Kesbangpol) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Daerah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kantor Kesbangpol pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Sekretaris Daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

1.2 Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi yang dituangkan dalam visi dan misi organisasi.

1.2.1 Kedudukan, Tugas dan fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali mempunyai tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kantor Kesbangpol mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan, penyusunan pelaksanaan, dan penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi teknis Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penyiapan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi Organisasi Politik, dan Pengembangan budaya politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, dan perlindungan masyarakat , fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, lembaga perwakilan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
 - c. Perumusan standart, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi organisasi politik dan perlindungan budaya politik.

1.2.2 Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali.

Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.
4. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
5. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyaratan dan Ekonomi.

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Kantor Kesbangpol penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai kategori baik. Namun ada beberapa kendala/ permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
- Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya , pertahanan dan keamanan.;
- Kemajuan teknologi komunikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan;
- Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral yang terjadi akibat diabaikannya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara;
- Maraknya kasus narkoba yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan kehidupan bangsa;
- Banyaknya Ormas dan LSM yang hanya sekedar mendapatkan SKT, dan kurang aktifnya pengurus Ormas dan LSM dalam memperbaharui SKT (Surat Keterangan Terdaftar) menyebabkan keberadaannya sulit dideteksi, sehingga pelaksanaan monitoring belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal;

- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan politik;
- Merosotnya kesadaran masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa.
- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi baik dalam partisipasi pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik;
- Masih adanya konflik dimasyarakat baik konflik politik, sosial, dan keagamaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dengan menerapkan Visi dan Misi Bupati Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali 2016-2021 sebagai berikut:

A. Visi Bupati

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi Bupati Boyolali adalah " **PRO INVESTASI MEWUJUDKAN BOYOLALI YANG MAJU DAN LEBIH SEJAHTERA**".

B. Misi Bupati

Misi adalah Pernyataan mengenai hal – hal yang harus dicapai Organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan Visi.

Misi Bupati Boyolali yang dapat diterapkan oleh Kantor Kesbangpol adalah " **Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera**".

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 mempunyai sasaran strategis :

1. Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dengan mengambil target tahun 2020.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019. Berikut Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2020:

1. Persentase Penurunan Jumlah Konflik antar Kelompok Masyarakat;
2. Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar);
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
4. Semakin meningkatnya peran generasi muda dalam bela negara dan wawasan kebangsaan (persatuan dan kesatuan).

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Kab. Boyolali Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja (Outcome)	Target	
1	2	3	4	
1.	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	98,78	%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00	%
		Cakupan Sosialisasi/ Fasilitasi Wawasan Kebangsaan pada Sekolah setingkat SLTA	88,37	%
		Fasilitasi pengembangan nilai – nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan.	38	Kegiatan
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19	Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar kelompok Masyarakat yang ditangani	85,71	%
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai – Nilai Wawasan Kebangsaan	20	Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100	%
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).	1,58	%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 437.569.000,00 yang

selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Perubahan (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali adalah perwujudan kewajiban Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan Kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (tahun 2020). Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (tahun 2020). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kantor Kesbangpol dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kesbangpol Tahun 2020.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja (Tapkin). Pada tahun anggaran 2020, Kantor Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan menjadi rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % = Sangat baik
- 76 % sampai 100 % = Baik
- 56 % sampai 75 % = Cukup
- Kurang dari 55 % = Kurang

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.

A. Sasaran 1 : Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial.

Pencapaian target kinerja sasaran ini terdapat pada indikator berikut pada tabel 3.1:

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RESTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020				KASI PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	100	93,90	96,34	97,56	98,78	98,78	100	B	Kasi Ketahanan Seni, Budaya Kemasyarakatan dan Ekonomi
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	82,00	78,00	80,00	80,00	82,00	82,00	100	B	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah	%	100	30,32	65,12	76,74	88,37	88,37	100	B	Kasi Bina Ideologi dan Wawasan dan Kasi Ketahanan Seni, Budaya

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR RESTRA TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	TAHUN 2020				KASI PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
selingkat SLTA										Kemasyarakatan dan Ekonomi
Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di Setiap Kecamatan	Kegiatan	190	38	38	38	38	38	100	B	Kasi Bina Ideologi dan Wasbang
Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kegiatan	95	19	19	19	19	19	100	B	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Cakupan Konflik antar Kelompok Masyarakat yang Ditangani	%	100	42,86	57,14	71,43	85,71	85,71	100	B	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Kegiatan	120	20	20	20	20	20	100	B	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
Cakupan Penyelesaian Konflik antar Umat Beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	B	Kasi Ketahanan Seni, Budaya Masyarakat dan Ekonomi
Cakupan Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	2,21	1,25	1,58	1,58	1,89	1,89	100	B	Kasi Bina Ideologi dan Wasbang
RATA-RATA CAPAIAN								100	B	

Capaian kinerja sasaran ini meliputi 9 (Sembilan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 9 (Sembilan) indikator kategori baik (100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran **Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial** per indikator :

1) Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)

- a. Keberhasilan capaian indikator ini diperoleh banyaknya LSM/Ormas yang memiliki SKT.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi banyaknya LSM/Ormas yang belum melaporkan keberadaannya ke Kantor Kesbangpol.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi LSM/Ormas.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- ✓ Melaksanakan kegiatan di Kantor Kesbangpol dengan menggunakan fasilitas Kantor Kesbangpol;

- ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 00 digunakan sebesar Rp. 00.

c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program pendidikan politik masyarakat dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan omas LSM, serta dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan money ke sekretariat LSM yang ada di Boyolali. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi.

Hambatan/pemmasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi UU Pemilu dan kesadaran berpolitik kepada masyarakat

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- Memberikan pembekatan pendidikan politik yang memadai;
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 600.000,00 digunakan sebesar Rp. 600.000,00.

- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan:

- Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan :
 - ✓ Penyuluhan Kepada masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi pendidikan politik dengan penyuluhan kepada masyarakat;
 - ✓ Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, bentuk kegiatannya adalah Fasilitasi verifikasi administrasi spj Bantuan Parpol;
 - ✓ Koordinasi forum-forum diskusi politik, bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi pendidikan politik dengan forum diskusi
 - ✓ Pengkondisian wilayah dan sosialisasi pemilu, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi tentang pemilu dan pembentukan tim desk pilkada.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

3) Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA

- a. Keberhasilan/capaian indikator ini disebabkan karena adanya sosialisasi dan pendekatan kedua belah pihak.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
- ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00 digunakan sebesar Rp. 4.800.000,00.

- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan Program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, bentuk kegiatannya adalah Pembentukan Paskibraka, Peringatan HUT kemerdekaan RI, dan Lomba Pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

- Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan:

- ✓ Fasilitasi pencapaian halqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, bentuk kegiatannya adalah Forum diskusi dan silaturahmi antar pimpinan lembaga/omas dan agama.

- Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dengan kegiatan:

- ✓ Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba.

Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

4) Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap kecamatan.

- a. Keberhasilan/capaian indikator ini disebabkan karena adanya sosialisasi dan pendekatan kedua belah pihak.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
 - ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 5,20% dari anggaran sebesar Rp. 28.485.000,00 digunakan sebesar Rp. 24.200.000,00.
- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan Program Pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan:
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi antar umat beragama;
 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat;
 - Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah, bentuk kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi dan diskusi dengan pelaku seni;
 - Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi antar Etnis serta Orang Asing, bentuk kegiatannya adalah silaturahmi antar etnis yang ada di Boyolali.

Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

5) Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan.

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pendekatan kedua belah pihak dan fasilitasi dari pihak-pihak terkait.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar kedua belah pihak.
- Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
 - ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan dari anggaran sebesar Rp. 0 digunakan sebesar Rp. 0.
- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan Forum Komunikasi Dini

Masyarakat. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

6) Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani

- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pendekatan kedua belah pihak dan fasilitasi dari pihak-pihak terkait.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar kedua belah pihak.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan.

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
- ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 4.400.000,00 digunakan sebesar Rp. 4.400.000,00.

- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan, dan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan orang asing. Dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan Kominda, Forum Komunikasi Dini Masyarakat, Kapasitas Kapabilitas masy. Sipil dalam penyelesaian konflik, dan Ketahanan ekonomi. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

7) Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai wawasan Kebangsaan.

- a. Keberhasilan capaian indikator ini diperoleh karena adanya sosialisasi dan pendekatan kedua belah pihak.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan

- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :

- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
- ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 00 digunakan sebesar Rp. 00.

- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan kegiatan Seminar, talk show, diskusi wawasan kebangsaan. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.
- 8) Cakupan penyelesaian Konflik antar Umat Beragama
- a. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan karena adanya pendekatan kedua belah pihak dan fasilitasi dari pihak-pihak terkait.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi antar kedua belah pihak.
- Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan.
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
 - ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 digunakan sebesar Rp. 4.000.000,00.
- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan kegiatan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.
- 9) Cakupan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN).
- a. Keberhasilan capaian indikator ini diperoleh karena adanya sosialisasi dan pendekatan kedua belah pihak.
- Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi.
- Alternatif solusi yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pencapaian target kinerja adalah dengan mengadakan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah dengan :
- ✓ Memberikan bekal pendidikan SDM yang memadai;
 - ✓ Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp. 00 digunakan sebesar Rp. 00.

- c. Untuk melaksanakan indikator ini dilaksanakan dengan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik dan berhasil mencapai target kinerja.

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan rata – rata capaian indikator adalah 100%, sedangkan capaian sasaran "Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan kesejahteraan sosial" adalah 100% atau kategori B. Keberhasilan sasaran tersebut secara umum didukung oleh:

- Adanya partisipasi dan peran serta dari masyarakat.
- Adanya dukungan dana dan Prasarana yang cukup dari Pemerintah

3.2 Realisasi Anggaran :

Alokasi dan realisasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp. 1.914.251.000,00 terealisasi Rp. 1.806.518.343,00 dengan penyerapan sebesar 94,37% atau efisiensi sebesar 5,63%.

Capaian Kinerja Keuangan Kantor Kesbangpol adalah sebagai berikut pada tabel 3.2:

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran tahun 2020	Realisasi	Target	Koordinator
1	2	5	6		4	
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan terdaftar))	Program Pendidikan Politik Masyarakat. - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Ormas LSM)	0	0	100 % 12 bulan	Kasi Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
2.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial. (Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum)	Program Pendidikan Politik Masyarakat - Penyuluhan Kepada Masyarakat - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik - Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik - Pengkondisian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu	600.000	600.000	100 % 100 orang 7 parpoi 100 orang 12 bulan	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran tahun 2020	Realisasi	Target	Koordinator
1	2	5	6		4	
3	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial. (Cakupan Sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	4.800.000	4.800.000	100 % 100 orang	Kasi Bina Ideologi dan Wasbang
4	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial. (Fasilitasi pengembangan Nilai-Nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan sosial - Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat - Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah - Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi Hubungan antar Etnis serta Orang Asing	28.485.000	24.605.000	100 % 120 orang 100 orang 100 orang 100 orang 12 bulan	Kasi Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi Kasi Bina Ideologi dan Wasbang Kasi Bina Ideologi dan Wasbang
5.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. - Pengendalian keamanan lingkungan (Sub kegiatan Forum Komunikasi Dini Masyarakat)	0	0	100 % 1 kegiatan	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
6.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Cakupan Konflik antar Kelompok Masyarakat yang ditangani)	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Orang Asing)	2.200.000	2.200.000	100 % 12 Bulan 12 Bulan	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Anggaran tahun 2020	Realisasi	Target	Koordinator
1	2	5	6		4	
7.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan)	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Seminar, Talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	0	0	100 % 200 orang	Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional
8.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Cakupan Penyelesaian Konflik antar Umat Beragama)	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan - Fasilitasi Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	4.400.000	4.400.000	100 % 4 kegiatan	Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
9.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial (Cakupan Sosialisasi pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) - Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	0	0	100 % 12 bulan	Kasi Bina Idiologi dan Wasbang
Jumlah Anggaran			40.485.000	36.605.000		

BAB IV

PENUTUP

1.1 SIMPULAN

Pada tahun 2020, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dari 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020, menunjukan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Lebih dari 100 % (sangat Baik) : - indikator (- %)
- 2) 75% sampai 100% (Baik) : 4 indikator (100%)
- 3) 55% sampai 75 % (Cukup) : - indikator (- %)
- 4) Kurang dari 55 % (Kurang) : - indikator (- %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 100 % (kategori Baik). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2020 berjumlah Rp 1.914.251.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 1.476.882.000,- dan Belanja Langsung Rp. 437.569.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 1.806.518.343,- atau sebesar 94,37%.

1.2 Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

- a. Memberdayakan segala potensi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali;
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja;
- c. Meningkatkan monitoring terhadap keberadaan dan aktivitas Ormas, LSM, dan OKP;
- d. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja kepada semua seksi secara berkala.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun lebih berkualitas dan dapat mengurangi kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
- c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan acuan dalam rangka perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
- d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
- e. Memperkuat komitmen bersama guna meningkatkan kinerjanya.

Boyolali, Januari 2021

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO, SH.MH
Pembina Tk I
NIP 19660430 199503 1 002

LAMPIRAN

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESBANGPOL

ADALAH :



Keterangan :

Kepala Kantor

: Suratno, SH.MH.

Kasubag TU

: Sri Mindaryati, SH, MH..

Kasi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

: Hartuti, SE

Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional

: Rulyan Giatmiko, SH.

Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama,

: Sринi Sumardiyanti.SE

Kemasyarakatan dan Ekonomi

RENCANA STRATEGIS Tahun 2016-2021
KANTOR KESBANGPOL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	93,90	96,34	97,56	98,78	100,00
2	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	78,00	80,00	80,00	82,00	82,00
3	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	30,32	65,12	76,74	88,37	100,00
4	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	38	38	38	38	38
5	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19	19	19	19	19

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00
7	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	20	20	20	20	20
8	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100	100	100	100	100
9	Meningkatkan kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk kenyamanan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	0,95	1,26	1,58	1,89	2,21

Boyolali, Januari 2021

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO, SH.MH

Pembina Tk. I

NIP. 19660430 199503 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016-2021
KANTOR KESBANGPOL**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Sumber Data	Pelaksana
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	Kegiatan	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Kegiatan Pengenalan Keamanan Lingkungan	Kegiatan	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	Kegiatan	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pem berantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, PROGRAM KE SASARAN KEGIATAN, KEGIATAN, INDIKATOR KEGIATAN DAN TARGET KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI TAHUN N - 1	TARGET						SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENGANGKAP
								REALISASI TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021		
4	1	6	7	9	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10 Masyarakat yang sejahtera, aman, dan mendapat perlindungan pemiran keagamaan sosial	02 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang diatasi	Terapanya Penanganan Keagamaan dan Kemanusiaan Lingkungan	Program Peningkatan Keagamaan dan Kemanusiaan Lingkungan	Cakupan kegiatan peningkatan Keagamaan dan Kemanusiaan lingkungan yang dilaksanakan	Terjadinya penyelenggaraan pengabdian keagamaan lingkungan	Pengabdian Keagamaan Lingkungan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pengabdian keagamaan lingkungan (KOGAMON)			12	12	12	12	12	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan sosialisasi keagamaan			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan sosialisasi keagamaan			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan sosialisasi keagamaan			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan sosialisasi keagamaan			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
	05 Tingkat partisipasi masyarakat dalam masalah umum	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan	Terjadinya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			7	60	7	15	15	Pasal Politik	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			500	200	200	200	200	orang	KAMKESBANGPOL
	05 Tingkat partisipasi masyarakat dalam masalah umum	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan	Terjadinya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			7	60	7	15	15	Pasal Politik	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			500	200	200	200	200	orang	KAMKESBANGPOL
	05 Tingkat partisipasi masyarakat dalam masalah umum	Meningkatnya partisipasi Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan	Terjadinya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			7	60	7	15	15	Pasal Politik	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			100	60	60	100	100	orang	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			1	1	1	1	1	Kegiatan	KAMKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat			500	200	200	200	200	orang	KAMKESBANGPOL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI TAHUN N-1	TARGET						SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
								REALISASI TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67	Cakupan sosialisasi/ fasilitas wawasan kebangsaan pada tingkat SLTA	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan	Tersedianya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	-		100	50	60	100	100	orang	KANKESBANGPOL
					Tersedianya penyelenggaraan kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan takwa di kalangan masyarakat	Pembinaan Peningkatan Iman dan Takwa di Kalangan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan, peningkatan iman dan takwa di kalangan masyarakat	-		100	50	60	100	100	orang	KANKESBANGPOL
					Tersedianya kegiatan sosialisasi seni budaya daerah	Pemeliharaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi seni budaya daerah	-		100	50	60	100	100	orang	KANKESBANGPOL
					Tersedianya kegiatan orkestrasi, dan pagelaran	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan orkestrasi, dan pagelaran	-		96	96	96	96	96	orang	KANKESBANGPOL
							Jumlah kegiatan rangkaian kegiatan HUT RI			1	1	1	1	1	kegiatan	KANKESBANGPOL
							Jumlah bendera pengusap Pancasila dan UUD 1945			1	1	1	1	1	kegiatan	KANKESBANGPOL
					Tersedianya kegiatan pembinaan, pengawasan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	Pembinaan, Pengawasan dan Harmonisasi Hubungan antar Etnis serta Orang Asing	Jumlah kegiatan kegiatan pembinaan, pengawasan dan harmonisasi hubungan antar etnis serta orang asing	-		1	1	1	1	1	kegiatan	KANKESBANGPOL
					Tersedia kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa soliditas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Peningkatan Rasa Soliditas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan peningkatan rasa soliditas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	-		100	50	60	100	100	orang	KANKESBANGPOL
		Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi halqah dan berbagai forum keagamaan lainnya	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan kegiatan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Tersedianya fasilitas pencapaian halqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Facilitas Pencapaian Halqah dan Berbagai Forum Keagamaan lainnya dalam upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan fasilitas pencapaian halqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	-		1	2	2	4	4	kegiatan	KANKESBANGPOL
				Meningkatnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Penyuluhan Pencegahan Penyakit/ Pengguguran Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah kegiatan pemberantasan keagamaan BNK	-		1	1	1	1	1	kegiatan	KANKESBANGPOL
							Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi P4GN			100	50	120	100	100	orang	KANKESBANGPOL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KONDISI TAHUN N - 1	TARGET						SATUAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
								REALISASI TH 2015	TH 2015	TH 2016	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	68 Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	Meningkatnya pengetahuan Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Saluran kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan	Tersedianya kegiatan monitoring omas dan LSM	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring omas dan LSM			1	1	1	1	1	Kegiatan	KANKESBANGPOL



**RENCANA KERJA TAHUNAN
KANTOR KESBANGPOL
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja (Outcome)	Target	
1	2	3	4	
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	98,78	%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00	%
		Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	88,37	%
		Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	38	Kegiatan
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19	Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	57,14	%
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	20	Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100	%
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,89	%

Boyolali, Januari 2020

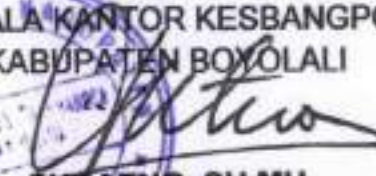

**KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI**
Drs. SABARUDIN, SH. MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681027 199403 1 005

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KANTOR KESBANGPOL
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja (Outcome)	Target	
1	2	3	4	
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100	%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00	%
		Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100	%
		Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	38	Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	100	%
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19	Kegiatan
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	20	Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100	%
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2,21	%

Boyolali, Januari 2021

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI


SURATNO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP. 19660430 199503 1 002

PENETAPAN KINERJA

SKPD : Kantor Kesbangpol
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	100 %
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00 %
		Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	100 %
		Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	38 Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	85,71 %
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19 Kegiatan
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	20 Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100 %
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	2,21 %

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Rp. 1.954.096.000,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Rp. 28.485.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Rp. 1.056.018.000,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Wawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Rp. 990.000.000,-	APBD

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Rp. 300.300.000,-

APBD

Jumlah

Rp. 4.328.599.000,-

Boyolali, Januari 2021

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO, SH.MH

Pembina Tk. I

NIP. 19660430 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURATNO, SH. MH

Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. SENO SAMODRO

Jabatan : BUPATI BOYOLALI.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua

Drs. SENO SAMODRO

Boyolali, Januari 2020

Pihak Pertama,



SURATNO, SH. MH

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (surat keterangan terdaftar	98,78 %
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	82,00 %
		Cakupan Sosialisasi/ Fasilitasi Wawasan Kebangsaan pada Sekolah setingkat SLTA	88,37 %
		Fasilitasi Pengembangan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan di Setiap Kecamatan	38 Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang Ditangani	85,71 %
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19 Kegiatan
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	20 Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100 %
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,89 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 873.966.000,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 47.500.000,00	APBD
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 9.750.000,00	APBD
4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 372.568.000,00	APBD
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 35.750.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp. 4.800.000,00	APBD
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 100.300.000,00	APBD
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 00	APBD

Total Anggaran

Rp.1.444.634.000,00

Boyolali, Januari 2020

Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI



Drs. SENO SAMODRO

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOALI



SURATNO, SH. MH

Pembina

NIP.19660430 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURATNO, SH. MH

Jabatan : KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Drs. SENO SAMODRO

Jabatan : BUPATI BOYOLALI.

Selaku atasan langsung Pihak Pertama. selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Pihak Kedua

Drs. SENO SAMODRO

Boyolali, Juni 2020

Pihak Pertama,

SURATNO, SH. MH

Pembina

NIP. 19660430 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOLALI

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (surat keterangan terdaftar	98,78 %
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	82,00 %
		Cakupan Sosialisasi/ Fasilitasi Wawasan Kebangsaan pada Sekolah setingkat SLTA	88,37 %
		Fasilitasi Pengembangan Nilai – Nilai Wawasan Kebangsaan di Setiap Kecamatan	38 Kegiatan
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang Ditangani	85,71 %
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19 Kegiatan
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai – Nilai Wawasan Kebangsaan	20 Kegiatan
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100 %
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,89 %

No	Program	Anggaran Perubahan	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 274.124.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 30.147.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 0,00	APBD
4.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 132.698.000,00	APBD
5.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 0,00	APBD
6.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rp. 0,00	APBD
7.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 600.000,00	APBD
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 0,00	APBD
Total Anggaran Perubahan		Rp.437.634.000,00	

Boyolali, Juni 2020

Menyetujui,
BUPATI BOYOLALI



Drs. SENO SAMODRO

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOYOALI



SURATNO, SH. MH

Pembina

NIP.19660430 199503 1 002

**RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**

**SKPD
JABATAN**

**KESKAMPOL
KEPALA KANTOR**

No	Nama / Nip / Pangkat	Sesuai Strategi	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target												Pejabat Penilai / Alasan Langsung
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	SUKATNO, SH. MH NIP. 19660430 199303 1 002	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													SEKDA Kab. Boyolali
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/ Operasional														
				Penyediaan Jasa Bersih-bersih Kantor														
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja														
				Penyediaan Alat Tulis Kantor														
				Penyediaan Barang Otakan dan														
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Telepon														
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
				Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peruntug-undangan														
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
				Penyediaan Makanan dan Minuman														
				Penyediaan Rapat-Rapat dan Konsultasi ke luar Daerah														
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran														
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
				Jemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengurusan Bina Desa dan Bina SKPD	Terpenuhinya Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
						Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	Rutin setiap bulan	
			Program Peningkatan Keamanan dan Ketertarikan Lingkungan	Pengendalian keamanan lingkungan	Terpenuhinya Program Peningkatan	5%	5%	10%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	

No	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target													Pejabat Penilai / Atasan Langsung	
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kemampuan dan Kenyamanan Lingkungan	Morev	Morev	Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ	Morev	Morev			
			Pendidikan Politik Masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	Tercapainya Program Pendidikan Politik Masyarakat															
				Facilitasi penyelesaian perselisihan partai politik			10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	5%			
				Koordinasi forum-forum diskusi politik																
				Pengkoordinasian Wilayah dan Sosialisasi Pemilu																
				Monitoring evaluasi dan pelaporan			Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ	SPJ			
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Tercapainya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan															
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat																
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			5%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%		
				Pembinaan Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan masyarakat																
				Pendidikaraan dan Pengembangan Seni budaya Daerah																
				Pembinaan Pengawasan dan Harmonisasi Hubungan antar Etnis serta Orang Asing		Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ	SPJ	SPJ	SPJ			
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pkmt)	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Tercapainya Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pkmt)	10%	10%	20%	10%	10%	10%		10%		10%		10%		10%	
						Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pembuatan Laporan Kegiatan	Pembuatan Laporan Kegiatan	Pembuatan Laporan Kegiatan		Rapat / Koordinasi Kegiatan		Rapat / Koordinasi Kegiatan		Rapat / Koordinasi Kegiatan			

No	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target												Pejabat Penilai / Atasan Langsung
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Program Kerjasama Pengembangan Wawasan Kebangsaan	fasilitasi Pencapaian Inisiasi dan Berbagai forum Keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan	Tersepaunya Program Kerjasama Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5%	5%	5%	5%	5%	15%	15%	10%	5%	15%	5%		
				Seminar Talk Show (akusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan		Adm Kelangkaan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelangkaan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelangkaan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelangkaan Pelaksanaan Kegiatan	Adm Kelangkaan Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ	SPJ	Pelaksanaan Kegiatan	SPJ		

Bojone, Januari 2020



NIP. 196604501945031002

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun 2020

SKPD : KESBANGPOL
JABATAN : KEPALA KESBANGPOL

NO	SKPD	Nama / Nip / Pangkat	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target												Pejabat Penilai
					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kesbangpol	SURATNO, SH. MH NIP. 19660430 199503 1 002	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (surat keterangan terdaftar)	4,94%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	9,88%	4,94%	4,94%	4,92%	Sekda
				Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum		3,07%	12,30%	19,48%	21,53%	15,38%	2,05%		2,05%		3,07%	3,07%	Sekda
				Cakupan Sosialisasi/ Fasilitasi Wawasan Kebangsaan pada Sekolah setingkat SLTA	4,42%	17,67%	16,20%	32,40%	7,16%	1,48%	3,68%						Sekda
				Fasilitasi Pengembangan Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan di Setiap Kecamatan				19		19							Sekda
				Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang Ditangani	4,29%	4,29%	6,43%	6,43%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	6,43%	6,42%	Sekda
				Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan				1	2	2	1	2	2	2	2	2	Sekda

			Kegiatan Event Pengembangan Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan						2	4	6	6	2			Sekda
			Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama		20,0%	30,0%	20,0%	30,0%								Sekda
			Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		0,10%	0,76%	0,19%	0,19%		0,19%		0,19%	0,09%	0,09%	0,09%	Sekda

Boyolali, Januari 2020

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI



SURATNO, SH.MH
Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

**PENGUKURAN KINERJA
KANTOR KESBANGPOL KAB BOYOLALI**

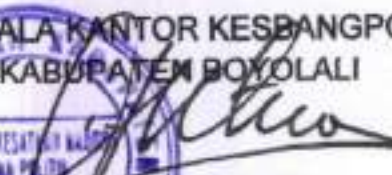
Kabupaten : Boyolali
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Masyarakat yang tertib, aman dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	Prosetase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	98,78%	98,78%	100%
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82,00%	82,00%	100%
		Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	88,37%	88,37%	100%
		Fasilitasi Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan di setiap Kecamatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	100%
		Cakupan Konflik Antar Kelompok Masyarakat yang ditangani	85,71%	85,71%	100%
		Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	100%
		Kegiatan Event Pengembangan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
		Cakupan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	100%	100%	100%
		Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	1,89%	1,89%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 437.569.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 351.989.306,-
Prosentase : 80,44%

Boyolali, Januari 2020

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BOYOLALI


SURATNO, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660430 199503 1 002